

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN LOKASI PERAIRAN
DAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN DI WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL.

PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN KEGIATAN WISATA BAHARI

Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan Kegiatan Wisata Bahari
berupa:

FORM A

CONTOH

PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN
WISATA BAHARI UNTUK ORANG PERSEORANGAN/KOPERASI/KORPORAS

KOP SURAT
(Untuk Orang Perseorangan/Korporasi/Koperasi)

Nomor : 20.....
Lampiran : berkas
Hal : Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Wisata Bahari

Yth.
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
Nomor HP :
No. Telp/Fax :
Email :

Bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha Orang Perseorangan/Korporasi/Koperasi.*)

NIB:

Dengan ini mengajukan permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Wisata Bahari, untuk Jenis Usaha (sebutkan Resort atau yang lainnya)

Posisi lokasi di....., dalam konstelasi wilayah administratif pemerintah terdekat,
Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
Nama Perairan/Laut :
Koordinat Lokasi : Lintang
Bujur
Luas : hektare
Untuk Kegiatan/Penggunaan :

Untuk melengkapi permohonan ini, kami sertakan dalam dokumen sebagaimana ketentuan yang dipersyaratkan.

Atas perkenan Bapak/Ibu*) Gubernur kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Materai Rp6.000,00

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

FORM B

CONTOH PAKTA INTEGRITAS

KOP SURAT
(Untuk Orang Perseorangan/Korporasi/Koperasi)

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. ktp :
NPWP :
Nomor HP :
No. Telp/Faks :
E-mail :

Bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha Orang Perseorangan/Korporasi/Koperasi.*)

.....
NIB:

Kami menyatakan, bahwa:

- (1) semua data/informasi yang kami sampaikan dalam dokumen persyaratan permohonan pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan Wisata Bahari adalah benar/sah sesuai kebenaran/keaslian
- (2) akan menghormati kepentingan pihak lain yang melakukan kegiatan/pemanfaatan ruang perairan di sekitarnya;
- (3) akan menyampaikan laporan berkala setiap 1 (satu) tahun sekali;
- (4) akan melakukan kegiatannya secara ramah lingkungan;
- (5) akan menjaga kelestarian ekosistem perairan pesisir;
- (6) akan menjaga kehidupan dan alur migrasi biota laut;
- (7) akan memberikan akses untuk nelayan kecil yang sudah secara rutin melintas;
- (8) akan memberikan akses/tempat berlindung kepada siapapun dalam kondisi darurat;
- (9) akan melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan/usahanya; dan
- (10) akan membongkar bangunan dan instalasi bila masa berlaku telah habis dan kegiatan usaha tidak dilanjutkan lagi.

Apabila dikemudian hari ternyata dalam dokumen persyaratan permohonan yang kami sampaikan tersebut tidak benar dan/atau tidak sah, dan kami tidak melaksanakan dalam pernyataan ini, kami **BERSEDIA** menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau apabila terdapat konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20.....

Kami yang menyatakan,

Stempel dan Materai Rp6.000,00

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

FORM C

PROPOSAL
PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN
WISATA BAHARI

(Pelaku Usaha)
NIB

Jenis Usaha : (*usaha wisata bahari apa yang akan dilakukan*)
Lokasi: (*lokasi perairan dan administrasi yang dimohonkan*)

TAHUN

*Catatan

Bundel dokumen dijilid dalam ukuran kertas folio.

Cover dokumen, dengan warna kertas:

1. Warna putih, untuk pelaku usaha Orang Perseorangan;
2. Warna biru laut, untuk pelaku usaha Korporasi, dan
3. Warna hijau muda, untuk pelaku usaha Koperasi.

KERANGKA PROPOSAL
PERMOHONAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN DI WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL (WISATA BAHARI)

DAFTAR ISI:

Halaman sampul

Ringkasan Eksekutif

Kata Pengantar

Daftar Isi

1. PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang; dan
- b. Maksud dan Tujuan.

2. PROFIL PERUSAHAAN

- a. Badan Hukum Perusahaan;
- b. Alamat Perusahaan;
- c. Bidang Usaha;
- d. Organisasi Perusahaan; dan
- e. Keuangan.

3. DOKUMEN TEKNIS IJIN PENGELOLAAN KEGIATAN WISATA BAHARI

Memberikan gambaran terkait dengan

- a. Kesesuaian dengan Rencana Zonasi;
- b. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya; dan
- c. Atraksi, aksesibilitas, dan amenities (sarana/prasarana).

4. ANALISIS KESESUAIAN DAN DAYA DUKUNG KAWASAN TERKAT DENGAN KEGIATAN USAHA

5. *DETAIL ENGINEERING DESIGN*

6. ANALISIS KELAYAKAN USAHA

- a. Analisa Operasional;
- b. Analisa SDM; dan
- c. Analisa Pembiayaan.

7. PERNYATAAN KESANGGUPAN

8. PENUTUP

Lampiran:

- a. salinan/fotokopi izin lokasi;
- b. salinan/fotokopi izin lingkungan dan dokumennya;
- c. kajian kesesuaian dan daya dukung kawasan; dan
- d. kajian kelayakan usaha.

KERANGKA PROPOSAL
PERMOHONAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN DI WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL (WISATA BAHARI)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. alasan pelaku usaha meminta izin;
2. dasar-dasar hukum yang terkait dengan wisata bahari; dan
3. posisi geografis dan batas administrative rencana lokasi kegiatan wisata bahari dan letak geografis dilengkapi dengan peta.

B. Maksud dan Tujuan Kegiatan Wisata Bahari

Berisi tentang tujuan permohonan izin yang meliputi:

1. peruntukan/penggunaan izin;
2. manfaat kegiatan wisata bahari bagi pemohonan izin, masyarakat, dan pemerintah sesuai dengan hasil konsultasi public; dan
3. jenis sarana/bangunan dan penempatannya.

II. PROFIL (Perorangan/Koperasi/Korporasi)

III. DOKUMEN TEKNIS IJIN PENGELOLAAN KEGIATAN WISATA BAHARI

A. Kesesuaian dengan Rencana Zonasi

Kesesuaian dengan RZ berisi:

1. Alokasi ruang di RZ pada lokasi yang domohonkan;
2. Koordinat Lintang dan Bujur atau UTM dan luasan lokasi yang dimohonkan; dan
3. Kondisi Daratan (apabila rencana penempatan bangunan terkait/terhubung dengan pemanfaatan daratan):
 - a. Geomorfologi meliputi bentuk dan tipologi pantai yang dilengkapi dengan peta;
 - b. Penggunaan lahan dan status lahan (dilengkapi informasi kepemilikan lahan);
 - c. Hidrologi meliputi curah hujan, air tanah, debit air sungai/saluran. Air limpasan; dan
 - d. Geoteknik, meliputi sifat fisik tanah.
4. Kondisi Perairan
 - a. bathimetri, berisi katur kedalaman dasar perairan dengan dilengkapi dengan peta;
 - b. kualitas air, berisi data fisik, kimia dan biologi;
 - c. hidrooceanografi, terdiri pasang surut, arus, gelombang, sedimen dasar laut;
 - d. ekosistem perairan, meliputi:
 - 1) mangrove, meliputi kerapatan dan luasan, jenis mangrove;
 - 2) terumbu karang meliputi tutupan, keragaman;
 - 3) padang lamun meliputi jenis dan sebaran; dan
 - 4) biota perairan lainnya.

B. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya

1. kondisi demografi masyarakat sekitar;
2. mata pencaharian dan pendidikan;
3. kearifan local/budaya setempat; dan
4. lainnya bila ada.

C. Atraksi, aksesibilitas, dan amenities (sarana/prasarana)

1. potensi daya tarik wisata yang ada;
2. aksesibilitas menuju lokasi usaha; dan
3. sarana dan prasarana yang sudah ada di sekitar usaha.

IV. ANALISA KESESUAIAN DAN DAYA DUKUNG KAWASAN TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA

Berisi tentang deskripsi daya dukung dan daya tampung lokasi yang dimohonkan.

V. *DETAIL ENGINEERING DESIGN*

Menggambarkan rencana detail yang akan dilakukan dalam rencana pembangunan terkait dengan sarana dan prasarana yang akan dibangun termasuk rencana pelaksanaan kegiatan, antara lain

- A. Koordinat lokasi bangunan dan instalasi di Laut untuk Wisata Bahari;
- B. Jenis dan daftar bangunan dan instalasi di Laut untuk Wisata Bahari; dan
- C. Metode penempatan dan pendirian bangunan dan instalasi di Laut dan material yang digunakan ramah lingkungan.

VI. ANALISA KELAYAKAN USAHA

A. Analisa Operasional:

Menggambarkan rencana operasional kegiatan yang meliputi:

1. manajemen pengelolaan pengunjung;
2. rencana pengelolaan sarana dan prasarana;
3. rencana monitoring dan pengawasannya dalam mengatasi dampak;
4. rehabilitasi kondisi ekosistem;
5. pelibatan masyarakat setempat dalam kegiatan usaha; dan
6. lainnya bila ada.

B. Analisa Pembiayaan

Berisi gambaran dan perhitungan rencana usaha

C. Analisa SDM

Berisi tentang kebutuhan tenaga kerja, rencana pelibatan masyarakat dan kualifikasi SDM yang digunakan.

VII. PERNYATAAN KESANGGUPAN

VIII. PENUTUP

FORM D

PERNYATAAN KESANGGUPAN

KOP SURAT
(Untuk Orang Perseorangan/Korporasi/Koperasi)

PERNYATAAN KESANGGUPAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. ktp :
NPWP :
Nomor HP :
No. Telp/Faks :
E-mail :

Bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha Orang Perseorangan/Korporasi/Koperasi.*)

.....
NIB:

Kami menyatakan kesanggupan untuk:

1. Memperhatikan bahan bangunan, desain, dan tata letak penempatan infrastruktur kegiatan wisata bahari di, yaitu:
 - a. Infrastruktur memperhatikan:
 - 1) bahan bangunan;
 - 2) desain; dan
 - 3) tata letak penempatan infrastruktur.
 - b. Bahan bangunan memenuhi ketentuan:
 - 1) ramah lingkungan; dan
 - 2) memiliki daya tahan 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
 - c. Desain memperhatikan:
 - 1) dibangun semi permanen;
 - 2) memiliki system sanitasi yang memenuhi standar kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan; dan
 - 3) memiliki teknologi pengolahan dan pembuangan limbah.
 - d. Tata letak penempatan infrastruktur pendukung kegiatan wisata bahari memenuhi ketentuan:
 - 1) tetap mempertahankan karakteristik bentang alam atau fungsi utamanya;
 - 2) tidak menutup/menghilangkan alur pelayaran tradisional masyarakat; dan
 - 3) memiliki teknologi pengolahan dan pembuangan limbah.
2. Melibatkan masyarakat lokal dalam pengusahaan pariwisata alam perairan di kawasan konservasi perairan;
3. Menyampaikan data dan informasi atau dokumen yang benar dan/atau sah;
4. Mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau menerima konsekuensi penuntutan hukum apabila: (1) data dan informasi atau dokumen tidak benar dan/atau tidak sah; dan (2) tidak mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Kami yang menyatakan,

Stempel dan Materai Rp6.000,00

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN